

INTISARI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan masalah klasik yang sudah ada dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, ketimpangan pendapatan antardaerah serta belum adanya manajemen keuangan yang baik sebagai acuan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. PAD yang merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah Aceh dalam memenuhi kepentingan umum melalui program-program pemerintahan daerah dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat sebagai daerah otonomi khusus masih belum bisa di maksimalkan oleh Pemerintah Aceh

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan daerah-daerah tingkat II yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa menunggu subsidi dari pemerintah pusat, karena adanya peralihan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, tetapi desentralisasi yang dilakukan secara cepat di Indonesia tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya tersebut.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan LKPD Provinsi Aceh yang terdiri dari: data pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk di kabupaten/kota Provinsi Aceh yang meliputi data dari tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB, dan jumlah penduduk dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menemukan bukti empiris adanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh pada periode 2011-2015. Penelitian menemukan bukti empiris pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh pada periode 2011-2015 berdampak positif dan signifikan. Penelitian ini menemukan bukti empiris pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh pada periode 2011-2015 berdampak positif dan signifikan.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah

ABSTRACT

District Own Source Revenue (DOSR) is a classic problem that already existed from the "Orde Baru" era until now. Beside of the transition power from Central Government to the Local Government, the inequality of revenue between regions and the absence of good financial management as a reference for all local governments are still be problem that the Government should be concern on. District Own Source Revenue (DOSR) that is the spearhead of fulfilling public interest from local government programs and increasing the welfare as a special autonomy region has not been able to maximize by the Aceh Government.

Since the enactment of Law Number 32 of 2004 on Regional Government enhanced by Law No. 9 of 2015 and Law No. 33 of 2004 on the financial balance between the central and regional governments, causing the second-level regions in Indonesia finance the development of their respective regions without waiting for subsidies from the central government, due to the transition from the centralized to decentralization system. The regions have the authority and responsibility to organize the public interests, but rapid decentralization in Indonesia is not followed by the increased capacity of local governments to manage these resources.

An analytical tool used in this research is the regression of the data panel. The data used was obtained from the Central Bureau of statistics and Report on local government finances (RLGF) of Aceh province which consist of: The district own source revenue data, government spending, Gross Domestic Regional Product (GRDP) and population in the district or the city of Aceh province which includes the data from years of 2011-2015. This research aims to know the extent of the influence of the government spending, Gross Domestic Regional Product (GRDP) and the population in increasing the district own source revenue.

The results of this study found empirical evidence of the impact of government expenditure on local revenue in Aceh Province in the period 2011-2015. The study finds empirical evidence of the effect of PDRB on local revenue in Aceh Province in the period 2011-2015 having a positive and significant. This study finds empirical evidence of the effect of the total population on the local revenue of the province in Aceh in the period 2011-2015 has a positive and significant.

Keywords: Local Revenue, PDRB, Population, Government Expenditure